BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Integrasi

1. Pengertian Integrasi

Secara etimologis, istilah integrasi berasal dari bahasa Inggris *integration* yang bermakna penyatuan, penggabungan, atau pembauran berbagai unsur yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi diartikan sebagai proses pembauran hingga membentuk suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan.[33] Pengertian ini menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan berbagai komponen dalam satu wadah, tetapi juga menyangkut proses penyelarasan sehingga setiap unsur dapat berfungsi secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Dahlan, integrasi merupakan proses penggabungan berbagai elemen yang memiliki karakteristik berbeda sehingga membentuk suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung. Senada dengan itu, Amril M menjelaskan bahwa integrasi adalah perpaduan berbagai komponen yang berbeda namun memiliki hubungan saling melengkapi sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang lebih kompleks, fungsional, dan bernilai.[34] Dari kedua pandangan tersebut dapat dipahami bahwa integrasi

---

[33] Siamak Mohebi et al., "*Social Support and Self - Care Behavior Study,*" no. *January* (2018): 1–6, https://doi.org/10.4103/jehp.jehp.

[34] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "*Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges."*

mengandung unsur keterhubungan, keselarasan, dan sinergi antara berbagai bagian yang sebelumnya berdiri sendiri.

Dalam perspektif yang lebih luas, integrasi tidak hanya dipahami sebagai penyatuan secara fisik atau struktural, tetapi juga mencakup penyatuan nilai, tujuan, fungsi, dan orientasi. Oleh karena itu, integrasi sering digunakan sebagai pendekatan untuk membangun hubungan yang selaras antara berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun pendidikan. Melalui integrasi, berbagai perbedaan yang ada tidak dihilangkan, melainkan disatukan dalam kerangka kerja yang saling menguatkan sehingga mampu menghasilkan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam bidang pendidikan, konsep integrasi memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan sekadar menggabungkan beberapa mata pelajaran atau materi pembelajaran. Integrasi pendidikan merupakan proses menghubungkan berbagai unsur pendidikan, seperti nilai, pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar, serta lingkungan sosial peserta didik ke dalam suatu sistem yang saling berkaitan. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran tidak berlangsung secara parsial atau terfragmentasi, melainkan membentuk pengalaman belajar yang utuh dan bermakna.

Pendidikan yang terintegrasi bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara seimbang, baik aspek intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual, maupun keterampilan praktis.[35]

[35] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia merupakan makhluk multidimensional yang tidak dapat dikembangkan hanya melalui penguasaan aspek kognitif semata. Oleh karena itu, integrasi dalam pendidikan menjadi sarana untuk menciptakan proses pembelajaran yang holistik sehingga peserta didik mampu memahami hubungan antara teori dan praktik, antara pengetahuan dan nilai, serta antara individu dan lingkungan sosialnya.

Urgensi integrasi dalam pendidikan semakin relevan di era globalisasi dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat modern, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, krisis moral, hingga perubahan iklim, merupakan masalah yang bersifat kompleks dan saling berkaitan.[36] Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan disiplin ilmu yang terpisah-pisah, melainkan memerlukan pemahaman yang komprehensif dan lintas bidang. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk mampu mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan dan nilai kehidupan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir sistemik *(systems thinking),* kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi juga dipahami sebagai upaya menyatukan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan realitas sosial. Integrasi ini bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara

[36] Marzieh Azizi et al., "*A Comparison of the Effects of Teaching through Simulation and the Traditional Method on Nursing Students' Self-Efficacy Skills and Clinical Performance: A Quasi-Experimental Study,"* BMC Nursing 21, no. 1 (2022): 1–8, https://doi.org/10.1186/s12912-022-01065-z.

ilmu agama dan ilmu umum, sehingga proses pendidikan mampu menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, integrasi menjadi landasan penting dalam membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara dimensi ketuhanan (hablum minallah), kemanusiaan (hablum minannas), dan hubungan dengan alam semesta.[37]

Dalam penelitian ini, integrasi dimaknai sebagai proses penyelarasan dan penginternalisasian nilai-nilai *Education for Sustainable Development* (ESD) ke dalam seluruh komponen Sistem Perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (SPI IMM). Integrasi tersebut mencakup aspek tujuan perkaderan, kurikulum dan materi, metode pembelajaran, budaya organisasi, hingga praktik-praktik kaderisasi yang dijalankan. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai ESD tidak diposisikan sebagai materi tambahan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi paradigma dan kerangka berpikir yang mewarnai seluruh proses perkaderan. Melalui integrasi tersebut diharapkan kader IMM mampu memiliki kesadaran keberlanjutan *(sustainability awareness),* tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, serta kemampuan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam Berkemajuan.

[37] Tolchah and Arfan Mu'ammar, "ISLAMIC EDUCATION IN THE GLOBALIZATION ERA; CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND CONTRIBUTION OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA."

2. Integrasi dalam Pembelajaran

Integrasi dalam pembelajaran merupakan suatu pendekatan pendidikan yang berupaya menghubungkan berbagai unsur pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai ke dalam satu kesatuan proses belajar yang utuh dan bermakna. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa realitas kehidupan tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah berdasarkan batasan disiplin ilmu tertentu.[38] Oleh karena itu, pembelajaran integratif berusaha menghilangkan sekat-sekat yang kaku antarbidang ilmu sehingga peserta didik mampu memahami suatu fenomena secara menyeluruh, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata.

Pada hakikatnya, integrasi dalam pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada kemampuan peserta didik dalam menghubungkan berbagai konsep, pengalaman, dan nilai yang diperoleh selama proses pendidikan. Dengan pendekatan ini, peserta didik didorong untuk melihat hubungan antara teori dan praktik, antara ilmu dan nilai, serta antara pembelajaran di kelas dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik tidak sekadar menerima informasi, tetapi mampu memahami relevansi dan penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

[38] Susan F. McLean, "*Case-Based Learning and Its Application in Medical and Health-Care Fields: A Review of Worldwide Literature*," *Journal of Medical Education and Curricular Development* 3 (January 27, 2016), https://doi.org/10.4137/JMECD.S20377.

Dalam perspektif integratif-interkonektif, proses pembelajaran harus mampu membangun dialog yang konstruktif antara berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, humaniora, maupun teknologi. Setiap bidang ilmu memiliki perspektif dan metode yang berbeda dalam memahami realitas. Namun, kompleksitas permasalahan kehidupan modern menuntut adanya kolaborasi antarilmu agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif.[39] Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai suatu bidang keilmuan tertentu, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir lintas disiplin *(interdisciplinary thinking)* dan berpikir sistemik *(systems thinking)*.

Integrasi dalam pembelajaran dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk yang saling melengkapi[40], meliputi :

a. Pertama, integrasi nilai *(value integration),* yaitu proses menghubungkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai moral, etika, spiritual, dan kemanusiaan. Dalam pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik. Misalnya, pembelajaran tentang lingkungan tidak hanya membahas aspek ilmiah terkait ekosistem, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan

[39] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."
[40] Turgunov, "Book Review: *Migration, Education And Employment – Pathways To Successful Integra*."

amanah dalam menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi.

b. Kedua, integrasi disiplin ilmu *(interdisciplinary integration),* yaitu upaya mengaitkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam memahami suatu fenomena atau permasalahan. Sebagai contoh, isu perubahan iklim dapat dikaji melalui perspektif ilmu lingkungan, ekonomi, politik, kesehatan, sosiologi, dan agama secara bersamaan. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa suatu persoalan tidak memiliki penyebab maupun solusi yang tunggal, melainkan memerlukan analisis yang multidimensional.[41]

c. Ketiga, integrasi pengalaman *(experiential integration),* yaitu menghubungkan teori yang dipelajari dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peserta didik memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam situasi konkret sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Kegiatan praktik lapangan, pengabdian masyarakat, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek merupakan beberapa bentuk implementasi integrasi pengalaman.

d. Keempat, integrasi teknologi dan inovasi *(technology integration),* yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Penggunaan platform digital, media interaktif, teknologi informasi, serta berbagai

[41] Suyitno, Lukma, and Sofiyana, "Penerapan Prinsip Education for Sustainable Development Dalam Pembentukan Perilaku Berkelanjutan Siswa."

inovasi pembelajaran dapat memperluas akses pengetahuan sekaligus meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan era digital dan revolusi industri.

e. Kelima, integrasi sosial dan lingkungan *(social and environmental integration),* yaitu menghubungkan proses pembelajaran dengan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kepekaan terhadap berbagai permasalahan sosial dan isu-isu ekologis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembelajaran memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan aspek afektif peserta didik. Integrasi tersebut mampu menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, empati, kepedulian sosial, kerja sama, serta kesadaran moral yang lebih baik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasikan melalui kebiasaan, pengalaman, dan praktik kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter yang lebih kuat dan berkelanjutan.[42]

[42] Suyitno, Lukma, and Sofiyana.

Dalam konteks *Education for Sustainable Development* (ESD), integrasi pembelajaran dipahami sebagai proses memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aktivitas pendidikan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.[43] Oleh karena itu, dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola yang baik harus dihubungkan secara terpadu dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu memahami keterkaitan antarberbagai aspek tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, integrasi pembelajaran dalam Sistem Perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (SPI IMM) dapat diwujudkan melalui penguatan materi perkaderan yang memuat isu-isu keberlanjutan, seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, ekonomi berkelanjutan, dan tanggung jawab generasi masa depan. Selain itu, integrasi dapat dilakukan melalui penerapan metode pembelajaran partisipatif, diskusi kritis*, problem based learning,* pengabdian masyarakat, gerakan peduli lingkungan, serta berbagai program pemberdayaan sosial yang berbasis nilai-nilai Islam Berkemajuan. Dengan pendekatan tersebut, kader IMM tidak hanya memiliki pemahaman ideologis dan keislaman yang kuat, tetapi juga memiliki kesadaran keberlanjutan, kemampuan berpikir kritis, kepedulian sosial, dan tanggung jawab ekologis sebagai

[43] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "I*mplementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges*."

bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat dan keberlangsungan kehidupan di masa depan.

3. Integrasi sebagai Pendekatan Pendidikan Transformatif

Integrasi dalam pendidikan pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai proses penggabungan berbagai disiplin ilmu, tetapi juga sebagai suatu pendekatan yang mendorong transformasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak peserta didik. Pendidikan yang terintegrasi bertujuan membentuk individu yang mampu memahami realitas secara utuh, kritis, dan reflektif sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial yang konstruktif. Dengan demikian, integrasi menjadi fondasi penting bagi lahirnya pendidikan transformatif yang berorientasi pada pembentukan manusia yang sadar terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan.

Konsep pendidikan transformatif banyak dipengaruhi oleh pemikiran Paulo Freire yang menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pembebasan *(education for liberation).* Menurut Freire, pendidikan tidak boleh hanya menjadi proses transfer pengetahuan *(banking education),* melainkan harus menjadi proses pembangkitan kesadaran kritis *(conscientization)* yang memungkinkan peserta didik memahami struktur sosial, mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan, dan berpartisipasi aktif dalam upaya transformasi masyarakat.[44]

[44] Rahmat Abd Fatah and Julhija Rasai, "Model Pendidikan Kader Berbasis Wawasan Kebangsaan Di Era-Post-Trust: Studi Kasus Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7, no. 1 (February 13, 2021): 40–62, https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i1.966.

Dalam konteks tersebut, integrasi menjadi kebutuhan mendasar karena berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat modern memiliki karakter multidimensional dan saling berkaitan. Isu kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, krisis energi, konflik identitas, serta degradasi lingkungan tidak dapat dipahami hanya melalui satu perspektif keilmuan. Oleh sebab itu, pendidikan harus mengintegrasikan dimensi intelektual, spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan agar peserta didik mampu melihat hubungan sebab-akibat secara sistemik dan menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan transformatif memiliki relevansi yang kuat dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, tajdid, dan peran manusia sebagai khalifah fil ardh. Pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial yang diwujudkan melalui upaya menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu melahirkan individu yang memiliki kemampuan intelektual, kesadaran moral, serta tanggung jawab sosial dan ekologis.[45]

Pendekatan transformatif juga sejalan dengan paradigma Islam Berkemajuan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Islam Berkemajuan menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadilan, dan kemajuan peradaban. Dalam kerangka

[45] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "*Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges*."

tersebut, integrasi tidak hanya menjadi strategi pedagogis, tetapi juga menjadi paradigma dalam membangun kesadaran keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Keterkaitan antara integrasi dan pendidikan transformatif menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan *Education for Sustainable Development* (ESD). UNESCO menempatkan ESD sebagai pendekatan pendidikan yang bertujuan mentransformasikan cara berpikir dan perilaku individu agar mampu berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ESD pada dasarnya merupakan bentuk konkret pendidikan transformatif yang berupaya menghubungkan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan tindakan dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.

4. Integrasi ESD dalam Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) IMM

Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) IMM merupakan kerangka dasar kaderisasi yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. SPI IMM dirancang untuk membentuk kader yang memiliki keseimbangan antara religiusitas, intelektualitas, dan humanitas sebagaimana tercermin dalam Trilogi IMM. Ketiga aspek tersebut menjadi identitas sekaligus orientasi utama proses perkaderan IMM.[46]

Jika dianalisis dari perspektif ESD, terdapat titik temu yang kuat antara tujuan perkaderan IMM dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

[46] Korps Instruktur Nasional, *Sistem Perkaderan Ikatan* (Jakarta: DPP IMM, 2025).

Religiusitas berfungsi sebagai landasan etis dan spiritual, intelektualitas menjadi instrumen pengembangan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan humanitas menjadi orientasi sosial yang menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang menekankan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan pembangunan.[47]

a. Integrasi pada Tujuan Perkaderan

   Integrasi ESD dalam tujuan perkaderan diarahkan untuk memperluas orientasi kaderisasi agar tidak hanya menghasilkan kader yang memahami ideologi organisasi dan nilai keislaman, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, kemiskinan, krisis kemanusiaan, dan kerusakan lingkungan.

   Kader IMM diharapkan menjadi *agent of change* yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dengan agenda pembangunan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat.

b. Integrasi pada Materi Perkaderan

   Materi perkaderan IMM dapat diperkaya dengan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan meliputi *sustainable development goals* (sdgs), perubahan iklim dan krisis,

[47] Riska Yanti Hasibuan, Zainun, and Muhammad Putra, "Implementasi Gerakan Sosial Kemasyarakatan Mahasiswa Muhammadiyah," *Al-Iman Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2023): 74–100.

ekologis.ekoteologi islam, keadilan sosial dan ekonomi, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan berkelanjutan, etika pembangunan dan lingkungan.

Integrasi materi tersebut dapat dilakukan tanpa menghilangkan substansi ideologi, keislaman, dan kemuhammadiyahan yang selama ini menjadi karakteristik perkaderan IMM.

c. Integrasi pada Metode Perkaderan

ESD menekankan pendekatan pembelajaran yang partisipatif, reflektif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Oleh karena itu, metode perkaderan IMM dapat diarahkan pada *problem based learning, project based learning,* service learning, pengabdian masyarakat, aksi sosial dan lingkungan, advokasi kebijakan publik, refleksi kritis terhadap realitas sosial.

Pendekatan ini memungkinkan kader belajar melalui pengalaman nyata dan mengembangkan kompetensi keberlanjutan secara langsung.[48]

d. Integrasi pada Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan instrumen penting dalam internalisasi nilai ESD. Implementasi keberlanjutan dalam organisasi dapat dilakukan melalui Pengelolaan kegiatan yang ramah lingkungan, Pengurangan sampah dan plastik sekali pakai, digitalisasi administrasi organisasi, penguatan budaya inklusif dan partisipatif,

[48] Korps Instruktur Nasional, *Sistem Perkaderan Ikatan*.

program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, kampanye sosial dan lingkungan.

Budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan akan memperkuat efektivitas kaderisasi karena nilai-nilai yang diajarkan dalam forum perkaderan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan organisasi.

e. Integrasi pada Profil Kader IMM

Integrasi ESD dalam SPI IMM diarahkan untuk membentuk profil kader yang memiliki karakter meliputi beriman dan berakhlak mulia, berpikir kritis, reflektif, dan sistemik, memiliki kesadaran ekologis. peka terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan, mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, memiliki jiwa kepemimpinan transformative, berkomitmen terhadap keadilan dan keberlanjutan.

Profil tersebut merupakan pengembangan kontekstual dari Trilogi IMM yang disesuaikan dengan tantangan global abad ke-21 tanpa menghilangkan identitas ideologis organisasi.

Berdasarkan berbagai teori integrasi, pendidikan transformatif, dan ESD, dapat disimpulkan bahwa integrasi ESD dalam SPI IMM merupakan proses penyelarasan antara nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dengan sistem kaderisasi IMM yang berlandaskan Islam Berkemajuan. Integrasi tersebut mencakup aspek tujuan, materi, metode, budaya organisasi, dan

profil kader yang dihasilkan.[49]

Melalui integrasi tersebut, SPI IMM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembentukan kader yang religius, intelektual, dan humanis, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kader yang memiliki kesadaran keberlanjutan *(sustainability consciousness),* kemampuan berpikir sistemik, kepedulian ekologis, serta kapasitas kepemimpinan transformatif. Dengan demikian, kader IMM diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, berkemajuan, dan berkelanjutan.

B. Konsep Sumber Daya Manusia

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sumber Daya Manusia (SDM)

   Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen sentral dalam proses pembangunan karena manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, manusia menjadi pelaku yang merancang, mengelola, dan mengembangkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun budaya. Sebagai objek pembangunan, manusia menjadi sasaran utama peningkatan kualitas hidup melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh negara maupun masyarakat.

   Menurut Hasibuan, SDM merupakan kemampuan terpadu yang berasal dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu dan digunakan

[49] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges."

untuk mencapai tujuan organisasi.[50] Sementara itu, Armstrong memandang SDM sebagai aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi melalui pengelolaan kompetensi, potensi, dan kapasitas manusia secara optimal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai modal utama yang menentukan keberhasilan pembangunan dan keberlangsungan organisasi.[51]

Dalam perspektif pembangunan modern, SDM dipahami sebagai *human capital* atau modal manusia. Teori *human capital* yang dikembangkan Becker menjelaskan bahwa investasi pada manusia melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas akan menghasilkan manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan daya saing. Oleh karena itu, kualitas SDM menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa.

Kualitas SDM dapat dilihat melalui empat dimensi utama. Pertama, pengetahuan (*knowledge*) yang berkaitan dengan kemampuan individu memahami informasi, konsep, dan teori yang diperlukan dalam kehidupan. Kedua, keterampilan (*skills*) yang mencerminkan kemampuan praktis untuk menerapkan pengetahuan dalam berbagai aktivitas. Ketiga, sikap (*attitude*) yang menunjukkan kecenderungan perilaku individu dalam merespons berbagai situasi secara positif dan konstruktif. Keempat, nilai

[50] Hasibuan, Zainun, and Putra, "Implementasi Gerakan Sosial Kemasyarakatan Mahasiswa Muhammadiyah."
[51] Hasibuan, Zainun, and Putra.

(*values*) yang menjadi landasan moral dan etika dalam penggunaan pengetahuan dan keterampilan.

Dengan demikian, SDM berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecakapan akademik dan teknis, tetapi juga oleh karakter, integritas, tanggung jawab sosial, dan orientasi nilai yang dimiliki individu. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kualitas SDM menjadi faktor penentu dalam menciptakan masyarakat yang mampu menghadapi berbagai tantangan global secara adaptif dan bertanggung jawab.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM merupakan proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu agar mampu beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat maupun organisasi. Pengembangan SDM tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan aspek intelektual, moral, sosial, dan kepemimpinan.

Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Pendidikan berfungsi meningkatkan kapasitas intelektual, kemampuan berpikir kritis, serta pembentukan karakter individu.[52] Pelatihan berfungsi meningkatkan keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu. Sementara itu, pemberdayaan bertujuan meningkatkan

[52] Suyitno, Lukma, and Sofiyana, "Penerapan Prinsip Education for Sustainable Development Dalam Pembentukan Perilaku Berkelanjutan Siswa."

kemampuan individu untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Pada era globalisasi dan revolusi industri saat ini, pengembangan SDM tidak lagi cukup berfokus pada penguasaan pengetahuan semata. Individu dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Kompetensi tersebut menjadi syarat penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas permasalahan global. Dengan demikian, pengembangan SDM harus dipahami sebagai proses pembentukan manusia yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab moral, dan kemampuan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

3. *Education for Sustainable Development* (ESD) dalam Pengembangan SDM

   a. Pengertian ESD dalam Perspektif Pengembangan SDM

      Education for Sustainable Development (ESD) merupakan pendekatan pendidikan yang dikembangkan UNESCO untuk mempersiapkan individu dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.[53] Dalam konteks pengembangan SDM, ESD dipahami

[53] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."

sebagai strategi pendidikan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga membentuk kesadaran terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

ESD menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, proses pendidikan harus mampu menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

b. Tujuan ESD dalam Meningkatkan Kualitas SDM

ESD bertujuan membentuk SDM yang mampu menghadapi tantangan global melalui pengembangan kesadaran, kompetensi, dan perilaku yang berorientasi pada keberlanjutan.[54] SDM yang dikembangkan melalui pendekatan ESD diharapkan memiliki kesadaran global, kemampuan berpikir reflektif, kepedulian terhadap lingkungan, komitmen terhadap keadilan sosial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dengan demikian, ESD tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan dimensi afektif dan perilaku yang diperlukan dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan.

c. Kompetensi SDM Berbasis ESD

UNESCO mengembangkan delapan kompetensi utama ESD yang menjadi dasar pembentukan SDM berkelanjutan. Kompetensi

[54] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges."

tersebut meliputi kemampuan berpikir sistemik, kemampuan antisipatif, kompetensi normatif, kompetensi strategis, kompetensi kolaboratif, berpikir kritis, kesadaran diri, dan kemampuan pemecahan masalah terpadu.[55]

Kompetensi-kompetensi tersebut memungkinkan individu memahami berbagai persoalan pembangunan secara holistik serta merancang solusi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

d. Karakteristik SDM Berkelanjutan (*Sustainable Human Resources*)

SDM berbasis ESD memiliki karakteristik yang berbeda dari paradigma SDM konvensional. SDM berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada produktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Karakteristik tersebut tercermin dalam kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, berpikir sistemik, berinovasi dalam menyelesaikan masalah, memiliki tanggung jawab sosial, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, ESD berperan sebagai instrumen penting dalam membentuk SDM yang mampu menjadi agen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan.

4. Pengembangan SDM dalam Perspektif Islam dan Muhammadiyah

[55] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."

Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan secara adil, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu, pengembangan SDM tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga membentuk kualitas spiritual dan moral manusia.

Konsep khalifah menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, konsep amanah mengajarkan bahwa seluruh potensi yang dimiliki manusia merupakan titipan Allah yang harus digunakan untuk kepentingan bersama. Tujuan akhir pengembangan manusia dalam Islam adalah terwujudnya insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan kepedulian sosial.

Dalam Muhammadiyah, pengembangan SDM diwujudkan melalui paradigma Islam Berkemajuan yang menekankan integrasi antara keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan. Paradigma ini bertujuan membentuk manusia unggul yang mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat melalui dakwah dan tajdid.[56]

[56] Kadar Risman, Abdul Rahim, and Nanda Salsabila, "Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid Pada Mahasiswa Melalui Perkaderan Darul Arqam Dasar (DAD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah," *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 167–74, http://melatijournal.com/index.php/JMAS.

Jika dianalisis lebih lanjut, trilogi IMM memiliki kesesuaian yang kuat dengan kompetensi ESD UNESCO. Religiusitas berkaitan dengan *self-awareness competency dan normative competency,* intelektualitas berkaitan dengan *critical thinking, systems thinking, dan problem solving competency*, sedangkan humanitas berkaitan dengan *collaboration competency dan strategic competency.*

Oleh karena itu, integrasi ESD dalam pengembangan SDM kader IMM bukan merupakan upaya memasukkan nilai baru ke dalam sistem kaderisasi, melainkan penguatan terhadap nilai-nilai yang telah menjadi identitas gerakan IMM. Integrasi tersebut berpotensi menghasilkan kader yang tidak hanya religius, intelektual, dan humanis, tetapi juga memiliki kompetensi keberlanjutan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan lokal maupun global dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan adil.

C. Konsep Education For Sustainable Development (ESD)

1. Pengertian *Education for Sustainable Development* (ESD)

Education for Sustainable Development (ESD) merupakan suatu pendekatan pendidikan yang dirancang untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan global serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. ESD lahir dari kesadaran bahwa berbagai persoalan dunia modern, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis energi, konflik sosial, dan degradasi budaya,

memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan perubahan cara berpikir dan perilaku manusia.[57] Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk membentuk individu yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Menurut UNESCO, ESD adalah pendidikan yang memberdayakan peserta didik agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, kelayakan ekonomi, serta keberagaman budaya demi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.[58] Definisi ini menunjukkan bahwa ESD tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kapasitas individu untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

Secara konseptual, ESD merupakan pengembangan dari pendidikan lingkungan (*environmental education)* yang memiliki cakupan lebih luas dan komprehensif. Jika pendidikan lingkungan lebih berfokus pada isu pelestarian alam dan perlindungan lingkungan, maka ESD mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan yang saling berkaitan, yaitu dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola *(governance)*. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa

---

[57] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."

[58] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "*Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges.*"

keberlanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui perlindungan lingkungan, tetapi juga memerlukan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penghormatan terhadap keberagaman budaya, serta sistem tata kelola yang baik.

ESD juga dipahami sebagai pendekatan pendidikan yang bersifat holistik dan transformatif. Holistik karena memandang berbagai persoalan pembangunan sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, sedangkan transformatif karena bertujuan mengubah cara berpikir *(ways of thinking),* cara bersikap *(ways of being),* dan cara bertindak *(ways of acting)* peserta didik.[59] Dengan demikian, ESD tidak sekadar mentransfer informasi mengenai pembangunan berkelanjutan, tetapi berupaya membangun kesadaran kritis dan kemampuan reflektif agar individu mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan global.

Sebagai pendekatan pendidikan transformatif, ESD mendorong peserta didik untuk menjadi agen perubahan *(agents of change)* yang mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan akademik, melainkan sebagai proses pengembangan kapasitas individu untuk memahami realitas, mengevaluasi berbagai pilihan tindakan, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

---

[59] Moch Tolchah and Muhammad Arfan Mu'ammar, "*Islamic Education In The Globalization Era; Challenges, Opportunities, And Contribution Of Islamic Education In Indonesia*," *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (October 7, 2019): 1031–37, https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74141.

Dalam implementasinya, ESD menekankan pengembangan sejumlah kompetensi utama yang dikenal sebagai *sustainability competencies.* Kompetensi tersebut meliputi kemampuan berpikir sistemik *(systems thinking competency),* berpikir kritis *(critical thinking competency),* kemampuan antisipatif *(anticipatory competency),* kemampuan kolaboratif *(collaboration competency),* kemampuan memecahkan masalah *(problem solving competency),* kompetensi strategis *(strategic competency),* kesadaran diri *(self-awareness competency),* serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan *(normative competency).* Kompetensi-kompetensi tersebut diperlukan agar individu mampu memahami kompleksitas berbagai persoalan global dan merancang solusi yang berorientasi pada keberlanjutan.

` Dalam konteks pendidikan tinggi, ESD memiliki peran yang sangat penting karena perguruan tinggi merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan.[60] Melalui ESD, mahasiswa didorong untuk memahami keterkaitan antara berbagai isu global, seperti kemiskinan, perubahan iklim, ketimpangan sosial, hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, keamanan pangan, serta pembangunan ekonomi. Pemahaman tersebut memungkinkan mahasiswa mengembangkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

[60] Suyitno, Lukma, and Sofiyana, "Penerapan Prinsip Education for Sustainable Development Dalam Pembentukan Perilaku Berkelanjutan Siswa."

Lebih lanjut, ESD dalam pendidikan tinggi tidak hanya diimplementasikan melalui kurikulum dan proses pembelajaran, tetapi juga melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, budaya kampus, serta aktivitas organisasi kemahasiswaan. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam kehidupan nyata melalui berbagai bentuk partisipasi sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan gerakan lingkungan.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip ESD memiliki kesesuaian dengan berbagai nilai dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep khalifah fil ardh menegaskan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan mengelola bumi secara bijaksana. Prinsip al-'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), tawazun (keseimbangan), dan rahmatan lil 'alamin juga menunjukkan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, masyarakat, dan lingkungan.[61] Oleh karena itu, implementasi ESD dalam pendidikan Islam dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kontemporer.

Dalam penelitian ini, *Education for Sustainable Development* (ESD) dipahami sebagai pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam seluruh proses perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

[61] Tolchah and Arfan Mu'ammar, "ISLAMIC EDUCATION IN THE GLOBALIZATION ERA; CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND CONTRIBUTION OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA."

Integrasi tersebut bertujuan membentuk kader yang tidak hanya memiliki religiusitas, intelektualitas, dan humanitas sebagaimana tercermin dalam Trilogi IMM, tetapi juga memiliki kesadaran keberlanjutan *(sustainability consciousness),* kemampuan berpikir sistemik, kepedulian sosial-ekologis, serta kapasitas untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang adil, berkemajuan, dan berkelanjutan.

2. Tujuan *Education for Sustainable Development* (ESD)

Education for Sustainable Development (ESD) pada dasarnya bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat yang memiliki kemampuan, kesadaran, serta komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. ESD tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan nilai, sikap, keterampilan, dan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan global secara bertanggung jawab.[62] Melalui ESD, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan individu yang mampu memahami kompleksitas persoalan dunia modern serta berkontribusi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurut UNESCO, tujuan utama ESD adalah memberdayakan peserta didik agar mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dan mengambil tindakan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi yang akan datang. Dengan demikian, ESD tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer *pengetahuan (transfer of*

[62] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "*Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges."*

knowledge), tetapi juga sebagai proses transformasi nilai dan perilaku yang mendorong lahirnya warga dunia yang bertanggung jawab *(responsible global citizens).*[63]

Secara umum, tujuan ESD dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama.[64]

a. Meningkatkan Pemahaman tentang Isu Keberlanjutan

Salah satu tujuan utama ESD adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan keberlanjutan. Peserta didik diharapkan mampu mengenali dan memahami berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis pangan, kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, serta berbagai persoalan pembangunan lainnya.

Pemahaman tersebut penting karena berbagai masalah global saat ini memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, ESD membantu peserta didik melihat keterkaitan antara berbagai persoalan tersebut sehingga mampu memahami akar permasalahan secara lebih komprehensif.

b. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Sistemik

ESD bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis *(critical thinking)* dan berpikir sistemik *(systems thinking).* Kemampuan

---

[63] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."
[64] Turgunov, "Book Review: Migration, Education And Employment – Pathways To Successful Integra."

berpikir kritis diperlukan agar peserta didik mampu menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan etis.

Sementara itu, kemampuan berpikir sistemik memungkinkan peserta didik memahami hubungan antarberbagai komponen dalam suatu sistem. Melalui kemampuan ini, individu dapat melihat bagaimana faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi dalam memengaruhi suatu persoalan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak bersifat parsial, tetapi mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul dalam jangka panjang.

c. Menumbuhkan Kesadaran terhadap Keterkaitan Dimensi Keberlanjutan

Tujuan penting lainnya dari ESD adalah membangun kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola.[65] Kesadaran ini membantu peserta didik memahami bahwa keberlanjutan hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara perlindungan lingkungan, keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya.

Melalui pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan perspektif yang lebih luas dalam melihat berbagai

[65] Putu Wulandari Safitri, "Membumikan Education for Sustainable Development (ESD) Di Indonesia Dalam Menghadapi Isu-Isu," 2018.

persoalan pembangunan dan tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat sektoral.

d. Membentuk Sikap dan Perilaku yang Bertanggung Jawab

ESD tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan perilaku.[66] Oleh karena itu, tujuan ESD mencakup pembentukan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan kehidupan secara keseluruhan.

Peserta didik diharapkan memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta menerapkan pola hidup yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata.

e. Mengembangkan Kemampuan Pengambilan Keputusan yang Berkelanjutan

Dalam kehidupan modern, individu sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu, ESD bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.

[66] Suyitno, Lukma, and Sofiyana, "Penerapan Prinsip Education for Sustainable Development Dalam Pembentukan Perilaku Berkelanjutan Siswa."

Kemampuan ini memungkinkan individu untuk memilih tindakan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Dengan kata lain, ESD mendorong berkembangnya pola pikir yang berorientasi pada tanggung jawab antargenerasi *(intergenerational responsibility)*.

f. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Pembangunan Masyarakat

ESD bertujuan membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, peserta didik didorong untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, seperti pengabdian masyarakat, pemberdayaan komunitas, advokasi sosial, gerakan lingkungan, serta berbagai aktivitas kemanusiaan lainnya.

Partisipasi aktif tersebut menjadi sarana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan realitas kehidupan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

g. Membentuk Agen Perubahan *(Agents of Change)*

Tujuan akhir ESD adalah membentuk individu yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Agen perubahan adalah individu yang memiliki kesadaran kritis, kepedulian sosial, kemampuan

kepemimpinan, serta komitmen untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.

Melalui ESD, peserta didik diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menginisiasi berbagai inovasi dan solusi terhadap persoalan sosial,[67] ekonomi, maupun lingkungan. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis sebagai ruang pembelajaran nonformal yang mendukung pencapaian tujuan ESD. Melalui organisasi, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan, serta keterampilan advokasi yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, tujuan ESD dalam organisasi kemahasiswaan tidak hanya membentuk mahasiswa yang unggul secara akademik, tetapi juga menghasilkan individu yang memiliki kepedulian sosial, kesadaran ekologis, jiwa kepemimpinan, dan komitmen terhadap keadilan serta keberlanjutan. Organisasi kemahasiswaan menjadi laboratorium sosial yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan secara langsung nilai-nilai pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pengabdian

[67] Hasibuan, Zainun, and Putra, "Implementasi Gerakan Sosial Kemasyarakatan Mahasiswa Muhammadiyah."

masyarakat, pemberdayaan komunitas, advokasi kebijakan publik, gerakan lingkungan, dan program kepemimpinan sosial.[68]

Dalam konteks penelitian ini, tujuan ESD sejalan dengan tujuan perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berorientasi pada pembentukan kader berkarakter religius, intelektual, dan humanis. Integrasi ESD dalam Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) IMM diharapkan mampu memperkuat proses kaderisasi dengan menghasilkan kader yang tidak hanya memiliki komitmen keislaman dan kemuhammadiyahan, tetapi juga memiliki kesadaran keberlanjutan *(sustainability consciousness),* kemampuan berpikir sistemik, kepedulian sosial-ekologis, serta kapasitas untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, berkemajuan, dan berkelanjutan.

3. Prinsip-Prinsip *Education for Sustainable Development* (ESD)

Implementasi *Education for Sustainable Development* (ESD) didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan. prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan nilai, sikap, keterampilan, dan perilaku yang mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.[69] Melalui prinsip-

[68] Fatah and Rasai, "Model Pendidikan Kader Berbasis Wawasan Kebangsaan Di Era-Post-Trust: Studi Kasus Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara."
[69] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."

prinsip ini, ESD diarahkan untuk menghasilkan individu yang mampu memahami kompleksitas persoalan global serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Prinsip-prinsip ESD mencerminkan karakter pendidikan yang holistik, transformatif, partisipatif, dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, penerapannya tidak hanya terbatas pada kurikulum atau materi pembelajaran, tetapi juga mencakup budaya pendidikan, metode pembelajaran, hubungan sosial, serta praktik kehidupan sehari-hari.[70]

a. Prinsip Holistik *(Holistic Principle)*

Prinsip holistik merupakan salah satu karakter utama ESD. Prinsip ini menegaskan bahwa berbagai persoalan kehidupan tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah karena memiliki keterkaitan yang kompleks. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu menghubungkan berbagai dimensi pembangunan, seperti lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam satu kerangka pemahaman yang utuh.

Pendekatan holistik mendorong peserta didik untuk melihat hubungan antara berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Dengan memahami keterkaitan tersebut, peserta didik dapat mengembangkan cara berpikir yang lebih komprehensif dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah.

[70] Turgunov.

Dalam konteks pendidikan, prinsip holistik juga mendorong integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan keberlanjutan.

b. Prinsip Berorientasi Masa Depan *(Future-Oriented Principle)*

ESD menekankan pentingnya orientasi jangka panjang dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran bahwa berbagai keputusan yang diambil pada masa sekarang akan memberikan dampak bagi kehidupan generasi mendatang.[71]

Melalui prinsip berorientasi masa depan, peserta didik didorong untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap tindakan yang dilakukan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan bagaimana memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga bagaimana menjaga ketersediaan sumber daya dan kualitas kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan hak generasi mendatang. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengembangkan kemampuan berpikir antisipatif *(anticipatory thinking)* agar mampu memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi serta merancang solusi yang berkelanjutan.

[71] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."

c. Prinsip Partisipatif *(Participatory Principle)*

Prinsip partisipatif menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam ESD, peserta didik tidak diposisikan sebagai penerima informasi secara pasif, tetapi sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam proses pencarian pengetahuan, diskusi, refleksi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah.

Pendekatan partisipatif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pendapat, berdialog, bekerja sama, dan berkontribusi dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Melalui proses tersebut, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja dalam tim.

Prinsip partisipatif juga mendorong penerapan metode pembelajaran yang aktif, seperti *problem based learning, project based learning, service learning,* diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning).* Dengan demikian, proses pendidikan menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan kehidupan nyata.[72]

d. Prinsip Keadilan dan Inklusivitas *(Justice and Inclusivity Principle)*

ESD menempatkan keadilan dan inklusivitas sebagai nilai fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa

[72] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges."

setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, sumber daya, kesempatan, dan partisipasi dalam pembangunan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, gender, maupun kondisi fisik.

Melalui prinsip ini, pendidikan diarahkan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan hak asasi manusia. Peserta didik diajak memahami bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Dalam praktiknya, prinsip keadilan dan inklusivitas diwujudkan melalui penciptaan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan, mendorong dialog, serta menghindari berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi.

e. Prinsip Berbasis Nilai *(Value-Based Principle)*

ESD tidak hanya berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan.[73] Oleh karena itu, pendidikan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

[73] Risman, Rahim, and Salsabila, "Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid Pada Mahasiswa Melalui Perkaderan Darul Arqam Dasar (DAD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah."

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam ESD meliputi tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, solidaritas, keadilan, kerja sama, penghormatan terhadap keberagaman, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh individu.

Dalam perspektif pendidikan Islam, prinsip berbasis nilai memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh. Oleh karena itu, implementasi ESD dalam lingkungan pendidikan Islam dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan.

f. Prinsip Transformasional *(Transformative Principle)*

Prinsip transformasional merupakan inti dari ESD. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta didik, tetapi juga menghasilkan perubahan dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak.[74] Dengan kata lain, ESD berupaya mendorong transformasi individu maupun masyarakat menuju pola kehidupan yang lebih berkelanjutan.

Melalui pendekatan transformasional, peserta didik diajak untuk merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki, mengkritisi berbagai praktik yang tidak berkelanjutan, serta mengembangkan alternatif solusi yang

[74] Suyitno, Lukma, and Sofiyana, "Penerapan Prinsip Education for Sustainable Development Dalam Pembentukan Perilaku Berkelanjutan Siswa."

lebih adil dan ramah lingkungan. Pendidikan menjadi sarana untuk membangun kesadaran kritis sekaligus mendorong tindakan nyata dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan lingkungan.

Prinsip ini menjadikan peserta didik sebagai agen perubahan *(agent of change)* yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi lingkungan sosialnya serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan ESD tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan sikap, perilaku, dan partisipasi peserta didik dalam kehidupan masyarakat.

4. Kompetensi *Education for Sustainable Development* (ESD)

Salah satu aspek penting dalam *Education for Sustainable Development* (ESD) adalah pengembangan kompetensi yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan pendidikan konvensional yang lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan, ESD berorientasi pada pengembangan kompetensi yang mencakup pengetahuan *(knowledge),* keterampilan *(skills),* sikap *(attitudes),* nilai *(values),* dan tindakan *(action)* yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks.[75]

Untuk mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan, UNESCO mengembangkan delapan kompetensi utama *(key sustainability competencies)* yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi-

[75] Suyitno, Lukma, and Sofiyana, "Penerapan Prinsip Education for Sustainable Development Dalam Pembentukan Perilaku Berkelanjutan Siswa."

kompetensi tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membentuk individu yang mampu berpikir kritis, bertindak strategis, serta berkontribusi terhadap transformasi sosial dan lingkungan.[76]

a. Kompetensi Berpikir Sistemik *(Systems Thinking Competency)*

   Kompetensi berpikir sistemik merupakan kemampuan untuk memahami hubungan antarberbagai komponen dalam suatu sistem serta mengenali keterkaitan antara berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Kompetensi ini memungkinkan individu melihat suatu masalah secara menyeluruh, bukan sebagai fenomena yang berdiri sendiri.

   Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, berbagai persoalan seperti kemiskinan, perubahan iklim, ketimpangan sosial, krisis energi, dan kerusakan lingkungan memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami bagaimana suatu tindakan dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan.

   Kemampuan berpikir sistemik membantu individu mengidentifikasi akar masalah, memahami hubungan sebab-akibat, serta merancang solusi yang mempertimbangkan berbagai dimensi pembangunan secara terpadu. Kompetensi ini menjadi fondasi penting dalam ESD karena keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas suatu sistem.

[76] Safitri, "Membumikan Education for Sustainable Development (ESD) Di Indonesia Dalam Menghadapi Isu-Isu."

b. Kompetensi Antisipatif *(Anticipatory Competency)*

Kompetensi antisipatif adalah kemampuan untuk memahami berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu keputusan atau tindakan. Kompetensi ini mendorong individu untuk berpikir melampaui kepentingan jangka pendek dan memperhatikan konsekuensi yang mungkin muncul bagi generasi mendatang.

Dalam ESD, kemampuan antisipatif penting karena berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan kelangkaan sumber daya, memerlukan perencanaan yang berorientasi pada masa depan. Individu yang memiliki kompetensi antisipatif mampu menganalisis tren, memprediksi berbagai skenario, serta menyusun strategi yang dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan keberlanjutan.[77]

Melalui kompetensi ini, peserta didik didorong untuk mengembangkan pola pikir jangka panjang *(long-term thinking)* yang menjadi salah satu prinsip utama pembangunan berkelanjutan.

c. Kompetensi Normatif *(Normative Competency)*

Kompetensi normatif merupakan kemampuan untuk memahami, merefleksikan, dan menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta norma yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Kompetensi ini

[77] Juniar Purwadi and Ghullam Hamdu, "IMPLEMENTASI KOMPETENSI GURU BERBASIS ESD: CONNECT, COLLABORATE, AND ENGAGE DI SD," *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)* 4 (2021): 2.

membantu individu mengevaluasi berbagai tindakan berdasarkan pertimbangan etis dan moral.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, solidaritas, dan penghormatan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek normatif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif Islam, kompetensi normatif memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai al-'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), amanah, tawazun (keseimbangan), dan tanggung jawab sebagai khalifah fil ardh. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis dalam implementasi pembangunan berkelanjutan.

d. Kompetensi Strategis *(Strategic Competency)*

Kompetensi strategis adalah kemampuan untuk merancang, merencanakan, dan melaksanakan berbagai tindakan yang efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kompetensi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berpikir, tetapi juga kemampuan bertindak secara nyata.[78]

Individu yang memiliki kompetensi strategis mampu mengidentifikasi peluang perubahan, menentukan langkah-langkah yang diperlukan,

[78] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges."

mengelola sumber daya secara efektif, serta mengimplementasikan solusi yang relevan terhadap berbagai permasalahan keberlanjutan.

Dalam konteks pendidikan, kompetensi ini membantu peserta didik mengubah ide dan gagasan menjadi tindakan konkret yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

e. Kompetensi Kolaboratif *(Collaboration Competency)*

Kompetensi kolaboratif merupakan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang, perspektif, dan kepentingan yang berbeda.[79] Kompetensi ini menjadi sangat penting karena berbagai persoalan pembangunan berkelanjutan tidak dapat diselesaikan oleh satu individu atau kelompok saja.

Melalui kompetensi kolaboratif, peserta didik belajar membangun komunikasi yang efektif, menghargai keberagaman, mengelola konflik, serta mencapai kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan ini memungkinkan terciptanya kerja sama yang produktif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Dalam era globalisasi, kolaborasi menjadi salah satu keterampilan utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

[79] Suyitno, Lukma, and Sofiyana, "Penerapan Prinsip Education for Sustainable Development Dalam Pembentukan Perilaku Berkelanjutan Siswa."

f. Kompetensi Berpikir Kritis *(Critical Thinking Competency)*

Kompetensi berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi berbagai asumsi yang ada, serta mempertanyakan praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak menerima informasi secara pasif, tetapi mampu melakukan refleksi, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan ini membantu individu memahami akar persoalan serta mengembangkan alternatif solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam ESD, berpikir kritis menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial, eksploitasi lingkungan, dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.

g. Kompetensi Kesadaran Diri *(Self-awareness Competency)*

Kompetensi kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami identitas, nilai, peran, tanggung jawab, serta pengaruh diri terhadap lingkungan sosial dan ekologis.[80] Kompetensi ini membantu individu mengenali posisi dirinya dalam masyarakat serta memahami bagaimana

[80] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."

tindakan yang dilakukan dapat memengaruhi orang lain dan lingkungan.

Kesadaran diri juga mendorong individu untuk melakukan refleksi terhadap nilai-nilai yang dianut, gaya hidup yang dijalani, serta kontribusi yang dapat diberikan bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami isu keberlanjutan secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan kehidupan pribadi dan tanggung jawab sosialnya.

h. Kompetensi Pemecahan Masalah Terpadu *(Integrated Problem-Solving Competency)*

Kompetensi pemecahan masalah terpadu merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai pengetahuan, keterampilan, perspektif, dan nilai dalam menyelesaikan persoalan yang kompleks. Kompetensi ini dianggap sebagai kompetensi yang paling komprehensif karena menggabungkan seluruh kompetensi keberlanjutan lainnya.[81]

Individu yang memiliki kompetensi ini mampu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta merumuskan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan multidimensional.

[81] Matitaputty.

Melalui kompetensi pemecahan masalah terpadu, peserta didik diharapkan mampu menjadi individu yang adaptif, kreatif, dan responsif terhadap perubahan serta mampu menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

5. *Education for Sustainable Development (ESD)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Education for Sustainable Development (ESD) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.[82] SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada tahun 2015 melalui Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda ini terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, kelaparan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian SDGs tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau kemajuan teknologi, tetapi juga pada perubahan pola pikir, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks inilah ESD memiliki peran yang sangat strategis. ESD dipandang sebagai instrumen

[82] Alvira Oktavia Safitri, Vioreza Dwi Yunianti, and Deti Rostika, "Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (June 3, 2022): 7096–7106, https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296.

utama untuk mendukung pencapaian SDGs karena pendidikan berfungsi membentuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Menurut UNESCO, ESD merupakan kunci dalam mempercepat pencapaian seluruh tujuan SDGs karena pendidikan memungkinkan individu memahami berbagai tantangan global serta mengembangkan kemampuan untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ESD tidak hanya menjadi bagian dari tujuan pendidikan, tetapi juga menjadi pendekatan yang mendukung implementasi seluruh agenda pembangunan berkelanjutan.[83]

Hubungan antara ESD dan SDGs tampak secara jelas pada Tujuan 4, yaitu Pendidikan Berkualitas (Quality Education), khususnya target 4.7 yang menekankan bahwa seluruh peserta didik perlu memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Target ini mencakup pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan itu sendiri, pendidikan hak asasi manusia, kesetaraan gender, budaya perdamaian, kewargaan global, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya.

Meskipun demikian, kontribusi ESD tidak terbatas pada pencapaian SDG 4 semata. ESD memiliki peran penting dalam mendukung seluruh tujuan SDGs karena setiap tujuan membutuhkan perubahan perilaku, kesadaran, dan kapasitas manusia yang dibentuk melalui pendidikan.

[83] Safitri, Yunianti, and Rostika.

Adapun keterkaitan ESD dengan masing-masing tujuan SDGs dapat dijelaskan sebagai berikut[84]

Gambar 2. 1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*



a. SDG 1: Tanpa Kemiskinan *(No Poverty)*

ESD berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pengembangan keterampilan hidup *(life skills),* literasi ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat. Pendidikan membantu individu meningkatkan kapasitas diri sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

b. SDG 2: Tanpa Kelaparan *(Zero Hunger)*

Melalui ESD, peserta didik memperoleh pemahaman tentang ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, serta

[84] Usman et al., "*Implementasi Sustainable Development Goals* (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam."

pentingnya pola konsumsi yang bertanggung jawab. Pengetahuan tersebut mendukung upaya menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.

c. SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera *(Good Health and Well-being)*

ESD mendorong peningkatan kesadaran mengenai kesehatan fisik, mental, dan sosial.[85] Pendidikan membantu individu memahami pentingnya perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, serta kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

d. SDG 4: Pendidikan Berkualitas *(Quality Education)*

Tujuan ini memiliki hubungan yang paling langsung dengan ESD. Pendidikan berkualitas menjadi fondasi bagi tercapainya seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui ESD, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran global, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menjadi agen perubahan.

e. SDG 5: Kesetaraan Gender (*Gender Equality)*

ESD mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penghapusan diskriminasi. Pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan membantu

[85] Safitri, Yunianti, and Rostika, "Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)."

membangun kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

f. SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation)*

Melalui ESD, peserta didik didorong untuk memahami pentingnya konservasi air, sanitasi yang layak, serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Kesadaran tersebut menjadi dasar dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi generasi sekarang dan mendatang.

g. SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau *(Affordable and Clean Energy)*

ESD membantu meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan energi secara efisien, pengembangan energi terbarukan, dan pentingnya transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan.[86] Pendidikan berperan dalam membangun budaya hemat energi dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan.

h. SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth)*

ESD membekali individu dengan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Kompetensi tersebut mendukung terciptanya tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

[86] Usman et al., "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam."

i. SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur *(Industry, Innovation and Infrastructure)*

ESD mendorong pengembangan inovasi yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Pendidikan membantu peserta didik mengembangkan pemikiran kreatif dan solusi inovatif yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri yang berkelanjutan.

j. SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan *(Reduced Inequalities)*

Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, ESD berkontribusi dalam mengurangi berbagai bentuk ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Pendidikan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan.

k. SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan *(Sustainable Cities and Communities)*

ESD membantu membangun kesadaran mengenai pentingnya tata ruang yang berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, mitigasi bencana, serta pelestarian warisan budaya.[87] Pendidikan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan kota yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

l. SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab *(Responsible Consumption and Production)*

[87] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges."

ESD mengajarkan pentingnya pola konsumsi yang bijaksana, pengurangan limbah, daur ulang, serta penggunaan sumber daya secara efisien. Melalui pendidikan, individu didorong untuk menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

m. SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim *(Climate Action)*

Salah satu fokus utama ESD adalah meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Pendidikan membantu individu memahami penyebab, dampak, serta strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin kompleks.[88]

n. SDG 14: Ekosistem Laut *(Life Below Water)*

ESD berperan dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut, mengurangi pencemaran, serta melestarikan keanekaragaman hayati perairan. Pendidikan membantu membentuk perilaku yang mendukung keberlanjutan sumber daya laut.

o. SDG 15: Ekosistem Daratan (*Life on Land)*

Melalui ESD, peserta didik memahami pentingnya konservasi hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan ekosistem daratan.

[88] Usman et al., "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam."

p. SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh *(Peace, Justice and Strong Institutions)*

ESD menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai. Pendidikan membantu membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

q. SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals)*

Pembangunan berkelanjutan memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi sipil, dan lembaga pendidikan.[89] Oleh karena itu, ESD mengembangkan kompetensi kolaborasi, komunikasi, dan kemitraan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara bersama-sama.

D. Masyarakat Yang Berkelanjutan Dan Adil

1. Konsep Masyarakat Berkelanjutan

Masyarakat berkelanjutan (sustainable society) adalah suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini berlandaskan pada paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan

[89] Safitri, Yunianti, and Rostika, "Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)."

pelestarian lingkungan hidup.[90]

Masyarakat berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keberlangsungan sumber daya alam, tetapi juga mencakup keberlanjutan sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam masyarakat berkelanjutan, setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Menurut perspektif UNESCO, masyarakat berkelanjutan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, mengelola sumber daya secara bijaksana, serta membangun hubungan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan sistem sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan isu ekologis, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat berkelanjutan dipahami sebagai masyarakat yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Konsep Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan kondisi ketika setiap individu memperoleh hak, kesempatan, perlakuan, dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan tanpa diskriminasi. Keadilan sosial tidak selalu berarti kesamaan

[90] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "*Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges*."

hasil, tetapi memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang adil untuk mencapai kesejahteraan.[91]

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial menjadi salah satu pilar utama karena pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan manfaat akan melahirkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan harus mampu mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan, meningkatkan akses pendidikan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan melindungi kelompok rentan.

Konsep keadilan sosial juga menekankan adanya keadilan antargenerasi *(intergenerational justice),* yaitu tanggung jawab generasi saat ini untuk menjaga sumber daya dan kualitas lingkungan agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga antara generasi yang hidup saat ini dengan generasi yang akan datang.

Dalam penelitian ini, keadilan sosial dipahami sebagai kondisi masyarakat yang memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mencapai kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan.

3. Indikator Masyarakat Berkelanjutan dan Adil

[91] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara.

Masyarakat berkelanjutan dan adil dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang mencerminkan keseimbangan pembangunan pada berbagai sektor kehidupan.[92]

a. Aspek Sosial

Aspek sosial berkaitan dengan kualitas hubungan antarmanusia serta tingkat kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Indikatornya meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. tingkat kohesi dan solidaritas sosial. kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, akses layanan kesehatan yang memadai, rendahnya tingkat diskriminasi dan konflik sosial, tingginya kepedulian terhadap kelompok rentan. Masyarakat yang berkelanjutan ditandai oleh hubungan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan.

b. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi berhubungan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan. Indikatornya meliputi tingkat kemiskinan yang rendah, kesempatan kerja yang layak, distribusi pendapatan yang lebih merata, kemandirian ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dukungan terhadap ekonomi lokal dan ekonomi berkelanjutan.[93] Pembangunan

---

[92] Usman et al., "*Implementasi Sustainable Development Goals* (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam."

[93] Salsabilla Aurelia Pratiwi, Ghea Cantika Noorsyarifa, and Nurliana Cipta Apsari, "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (August 8, 2022): 72, https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965.

ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

c. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan berkaitan dengan kemampuan masyarakat menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam. Indikatornya meliputi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah yang efektif, konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan energi secara efisien, adaptasi terhadap perubahan iklim. Keberlanjutan lingkungan menjadi syarat utama keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan.

d. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor strategis dalam mewujudkan masyarakat berkelanjutan dan adil. Indikatornya meliputi akses pendidikan yang merata, kualitas pendidikan yang baik, tingkat literasi masyarakat, pengembangan karakter dan kepedulian sosial, integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning).* Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan.

4. Masyarakat Berkelanjutan dalam Perspektif SDGs

Konsep masyarakat berkelanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan agenda

pembangunan global yang bertujuan untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Dalam perspektif SDGs, masyarakat berkelanjutan tercermin melalui pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi layak, hingga akses energi bersih dan terjangkau. Selain itu, SDGs juga menekankan pentingnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan, serta pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, SDGs juga mencakup upaya penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut dan daratan, serta penguatan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan dalam mencapai seluruh tujuan tersebut.[94]

Melalui SDGs, pembangunan tidak lagi dipahami hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Masyarakat Berkelanjutan dan Adil dalam Perspektif Islam

Islam memiliki seperangkat nilai yang mendukung terwujudnya masyarakat berkelanjutan dan adil. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar moral dalam

[94] Cahyani, Vioreza, and Kusuma Negara, "*Implementing Educationfor Sustainable Development (ESD)) In The Context Of Indonesian Education: Strategies And Challenges.*"

membangun kehidupan yang harmonis antara manusia, masyarakat, dan lingkungan.[95]

a. Keadilan ('Adalah)

Keadilan (al-'adalah) merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menuntut setiap individu diperlakukan secara proporsional sesuai hak dan kewajibannya.

Dalam konteks masyarakat berkelanjutan, keadilan berarti pemerataan akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi. Keadilan juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan dan penghapusan berbagai bentuk diskriminasi. Prinsip ini selaras dengan tujuan SDGs yang menekankan pentingnya inklusivitas dan pengurangan kesenjangan sosial.

b. Kemaslahatan (Maslahah)

Maslahah merupakan prinsip yang mengutamakan kemanfaatan dan kesejahteraan umum. Segala kebijakan dan tindakan harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep maslahah menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

c. Keseimbangan (Tawazun)

---

[95] Tolchah and Arfan Mu'ammar, *"Islamic Education In The Globalization Era; Challenges, Opportunities, And Contribution Of Islamic Education In Indonesia."*

Tawazun berarti keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta antara pemanfaatan dan pelestarian alam.[96] Konsep ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

d. Persaudaraan Kemanusiaan (Ukhuwah Insaniyah)

Ukhuwah insaniyah merupakan konsep persaudaraan universal yang mengakui bahwa seluruh manusia merupakan bagian dari satu komunitas kemanusiaan. Prinsip ini mendorong terciptanya solidaritas sosial, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan global. Masyarakat yang menjunjung tinggi ukhuwah insaniyah akan lebih mudah mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan kehidupan bersama.

6. Peran Pendidikan dan Kaderisasi dalam Mewujudkan Masyarakat Berkelanjutan dan Adil

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kesadaran yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.[97]

[96] Matitaputty, "Implementasi Esd Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 8 Ambon."
[97] Matitaputty.

Pendidikan berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat.

Di sisi lain, kaderisasi berfungsi sebagai proses pembentukan agen perubahan *(agent of change)* yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks IMM, Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) menjadi instrumen strategis untuk membentuk kader yang religius, intelektual, dan humanis melalui Trilogi IMM. Integrasi ESD ke dalam SPI IMM memungkinkan proses kaderisasi menghasilkan kader yang tidak hanya memiliki kesadaran keislaman dan kapasitas intelektual, tetapi juga memiliki komitmen terhadap keadilan sosial, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.[98] Dengan demikian, kader IMM dapat berperan sebagai agen transformasi yang berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat berkelanjutan dan adil sesuai nilai-nilai Islam Berkemajuan serta tujuan pembangunan berkelanjutan global.

E. Sistem Perkaderan Ikatan

1. Sejarah dan Filosofi Perkaderan IMM

Perkaderan merupakan elemen fundamental dalam keberlangsungan gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Sebagai organisasi kader, IMM menempatkan kaderisasi sebagai inti dari seluruh aktivitas

[98] Violina Azzahra and Andri Wijaya, "Peran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dalam Membentuk Karakter Islami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang," *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 2, no. 4 (December 28, 2024): 186–98, https://doi.org/10.62083/6aqbxf77.

organisasi karena melalui proses inilah nilai, ideologi, visi gerakan, serta arah perjuangan organisasi diwariskan dan dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) 2025, kaderisasi dipahami sebagai proses pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus (*never ending process)* untuk membentuk kader yang mampu mengembangkan potensi diri serta berperan aktif dalam ranah persyarikatan, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.[99]

Kaderisasi dalam IMM tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran ideologis, kemampuan intelektual, kepemimpinan, dan komitmen sosial. Oleh karena itu, perkaderan menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan kader yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga keberlanjutan gerakan Muhammadiyah dan IMM.[100]

a. Sejarah Perkaderan IMM

Secara historis, sistem perkaderan IMM tidak dapat dilepaskan dari tradisi kaderisasi yang berkembang dalam Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Sebagai gerakan Islam yang berorientasi pada pembaruan (tajdid), Muhammadiyah menyadari bahwa keberhasilan dakwah serta transformasi sosial sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai sarana utama dalam membentuk kader serta

[99] Korps Instruktur Nasional, *Sistem Perkaderan Ikatan*.
[100] Korps Instruktur Nasional.

melahirkan generasi pembaharu yang berdaya saing dan berkemajuan. Perhatian Muhammadiyah terhadap kaderisasi semakin menguat ketika dibentuk Badan Pendidikan Kader (BPK) pada tahun 1957. Pembentukan lembaga tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya sistematisasi kaderisasi Muhammadiyah karena bertujuan menyiapkan kader yang memiliki kapasitas ideologis, organisatoris, dan intelektual untuk melanjutkan perjuangan persyarikatan.

Lahirnya IMM pada tanggal 14 Maret 1964 menjadi bagian dari strategi Muhammadiyah dalam memperluas kaderisasi di kalangan mahasiswa. Kehadiran IMM dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan wadah pembinaan mahasiswa yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, intelektualitas, dan gerakan sosial dalam lingkungan perguruan tinggi. IMM kemudian berkembang sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang secara khusus bertanggung jawab dalam membina kader mahasiswa.

Seiring perkembangan organisasi, kebutuhan akan sistem kaderisasi yang lebih terarah mendorong lahirnya Sistem Perkaderan Ikatan (SPI). SPI pertama kali dirumuskan pada tahun 1965 pada masa kepemimpinan Mohammad Djasman Alkindi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM. Sejak saat itu, SPI terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan kader, serta tantangan zaman yang dihadapi organisasi.

Perubahan SPI dari berbagai periode menunjukkan bahwa kaderisasi IMM bersifat dinamis dan adaptif. Penyempurnaan yang berujung pada lahirnya SPI 2025 merupakan bentuk respons organisasi terhadap berbagai tantangan kontemporer, seperti globalisasi, revolusi digital, krisis lingkungan, perubahan sosial, perkembangan demokrasi, serta kebutuhan penguatan kepemimpinan generasi muda. Dengan demikian, SPI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kaderisasi, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan gerakan yang memungkinkan IMM tetap relevan dengan perkembangan zaman.

b. Filosofi Perkaderan IMM

Secara filosofis, perkaderan IMM berakar pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta tradisi kaderisasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun generasi awal Islam. Salah satu inspirasi utama dalam sistem kaderisasi IMM adalah proses pembinaan yang dilakukan Rasulullah SAW di Dar al-Arqam.

Dar al-Arqam merupakan rumah milik Al-Arqam bin Abi al-Arqam yang digunakan sebagai pusat pembinaan umat Islam pada fase awal dakwah di Makkah. Tempat tersebut menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai tauhid, memperkuat komitmen perjuangan, serta mempersiapkan kader yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Model pembinaan di Dar al-Arqam menunjukkan bahwa proses kaderisasi bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses transformasi kepribadian yang menghasilkan individu dengan keyakinan yang kuat, integritas moral yang tinggi, serta kemampuan memimpin perubahan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian diadaptasi dalam sistem perkaderan IMM melalui jenjang Darul Arqam yang menjadi instrumen utama pembentukan kader.

Filosofi perkaderan IMM juga bertumpu pada keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki tanggung jawab spiritual, intelektual, dan sosial. Oleh karena itu, proses kaderisasi harus mampu mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh dan seimbang. Kader yang dihasilkan tidak hanya memiliki kualitas keagamaan yang baik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kesadaran sosial, dan komitmen terhadap kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, perkaderan IMM diarahkan untuk membentuk kader yang mampu mengintegrasikan nilai keislaman dengan kemampuan intelektual dan kepedulian sosial. Integrasi ini kemudian dikenal melalui Trilogi IMM, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas yang menjadi identitas utama kader IMM.

c. Hakikat Perkaderan dalam Perspektif SPI

Dalam perspektif SPI 2025, perkaderan dipahami sebagai proses pendidikan kader yang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak berhenti pada satu jenjang tertentu. Kaderisasi bukan hanya kegiatan

formal berupa pelatihan atau pengkaderan, tetapi mencakup seluruh proses pembelajaran yang dialami kader selama berorganisasi.

Hakikat perkaderan terletak pada upaya membangun kesadaran kritis, memperkuat identitas ideologis, mengembangkan kapasitas kepemimpinan, serta membentuk karakter kader yang mampu menjalankan fungsi dakwah dan transformasi sosial. Melalui proses tersebut, kader diharapkan mampu menjadi subjek perubahan yang aktif dalam menghadapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Perkaderan juga dipandang sebagai sarana reproduksi nilai dan regenerasi organisasi. Tanpa kaderisasi yang baik, organisasi akan kehilangan arah, identitas, dan keberlanjutan gerakannya. Oleh karena itu, kaderisasi menjadi investasi jangka panjang yang menentukan masa depan IMM sebagai gerakan mahasiswa Islam.

Jika dikaitkan dengan Education for Sustainable Development (ESD), filosofi perkaderan IMM memiliki kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip pendidikan transformatif yang menjadi dasar ESD. Kaderisasi IMM tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang memahami nilai-nilai Islam, tetapi juga membentuk kader yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kesadaran sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta komitmen terhadap perubahan masyarakat.

Prinsip kaderisasi yang berorientasi pada transformasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan karakter sejalan dengan

tujuan ESD dalam menciptakan individu yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, sejarah dan filosofi perkaderan IMM memberikan landasan konseptual yang kuat bagi integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam Sistem Perkaderan Ikatan.

2. Pengertian Sistem Perkaderan Ikatan (SPI)

Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) merupakan pedoman resmi yang mengatur seluruh proses kaderisasi dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). SPI berfungsi sebagai kerangka konseptual, operasional, dan strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan kader pada seluruh tingkatan organisasi. Keberadaan SPI diperlukan untuk memastikan bahwa proses kaderisasi berjalan secara sistematis, terarah, berkesinambungan, dan selaras dengan tujuan gerakan IMM.[101]

Secara konseptual, SPI tidak hanya berisi petunjuk teknis pelaksanaan perkaderan, tetapi juga memuat landasan filosofis, ideologis, metodologis, dan organisatoris yang menjadi dasar pembentukan kader IMM. Oleh karena itu, SPI dapat dipahami sebagai sistem pendidikan kader yang dirancang untuk mengembangkan seluruh potensi kader secara integral, meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, sosial, dan kepemimpinan.

Dalam SPI 2025, sistem perkaderan mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan, antara lain paradigma kaderisasi, tujuan perkaderan,

[101] Muhammad Fahmy Robbaani, *Penguatan Karakter Islami Melalui Program Darul Arqam Dasar Pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram* (Mataram, 2023).

profil kader, kurikulum, metode pembelajaran, jenjang perkaderan, mekanisme evaluasi, hingga pengelolaan kelembagaan perkaderan. Seluruh komponen tersebut dirancang untuk mendukung terwujudnya kader IMM yang memiliki kapasitas ideologis, intelektual, dan praksis dalam menjalankan peran organisasi.[102]

Sebagai pedoman organisasi, SPI memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai instrumen standarisasi kaderisasi agar pelaksanaan perkaderan di berbagai tingkatan organisasi memiliki arah dan kualitas yang relatif seragam. Kedua, sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam, Muhammadiyah, dan IMM kepada seluruh kader. Ketiga, sebagai instrumen pengembangan kapasitas kader agar mampu menghadapi tantangan sosial, keilmuan, dan kebangsaan yang terus berkembang. Keempat, sebagai mekanisme regenerasi organisasi yang menjamin keberlanjutan gerakan IMM dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif organisasi, SPI juga berfungsi sebagai instrumen transformasi ideologi. Melalui sistem perkaderan, nilai-nilai dasar IMM ditanamkan, dipahami, dan diaktualisasikan dalam kehidupan kader. Dengan demikian, SPI tidak hanya membentuk kader yang memahami ideologi organisasi secara konseptual, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

[102] Korps Instruktur Nasional, *Sistem Perkaderan Ikatan*.

Berkaitan dengan penelitian ini, SPI menjadi ruang strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai *Education for Sustainable Development* (ESD). Karena SPI mengatur tujuan, materi, metode, budaya organisasi, dan profil kader yang ingin dihasilkan, maka integrasi ESD dapat dilakukan secara sistematis dalam seluruh komponen kaderisasi. Melalui pendekatan tersebut, SPI tidak hanya menjadi instrumen pembentukan kader yang religius, intelektual, dan humanis, tetapi juga kader yang memiliki kesadaran keberlanjutan *(sustainability consciousness)* serta kemampuan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Landasan Sistem Perkaderan Ikatan (SPI)

Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) disusun berdasarkan landasan filosofis, ideologis, dan normatif yang menjadi pijakan dalam seluruh proses kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Landasan tersebut berfungsi sebagai sumber nilai yang mengarahkan tujuan, materi, metode, dan orientasi perkaderan sehingga proses pembentukan kader berjalan sesuai dengan identitas dan cita-cita gerakan IMM. Dalam SPI 2025, landasan perkaderan tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun karakter, pola pikir, dan perilaku kader dalam menjalankan peran keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan.[103]

a. Al-Qur'an dan As-Sunnah

[103] Korps Instruktur Nasional.

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi landasan fundamental dalam seluruh proses perkaderan IMM. Kedua sumber tersebut menjadi pedoman normatif dalam membentuk orientasi kehidupan kader, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun sosial.

Melalui landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah, proses kaderisasi diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran tauhid yang kuat sehingga setiap aktivitas kader senantiasa berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Kesadaran tauhid tersebut menjadi dasar dalam membangun integritas moral, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap kemaslahatan umat dan bangsa.

SPI menegaskan bahwa kader IMM harus mampu mengintegrasikan tiga dimensi hubungan kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Allah (hablun min Allah), hubungan manusia dengan sesama manusia (hablun min an-nas), dan hubungan manusia dengan alam semesta (hablun min al-'alam). Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab sosial dan ekologis yang relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan pada masa kini.

b. Ideologi Muhammadiyah

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, IMM menjadikan ideologi Muhammadiyah sebagai fondasi gerakan dan kaderisasi. Ideologi Muhammadiyah berakar pada gerakan dakwah Islam yang berorientasi

pada amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid (pembaruan) guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Dalam konteks perkaderan, ideologi Muhammadiyah diwujudkan melalui penguatan semangat pembaruan, pengembangan ilmu pengetahuan, moderasi beragama, serta keberpihakan terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Kader IMM didorong untuk memiliki cara pandang yang terbuka terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Ideologi Muhammadiyah juga menekankan pentingnya integrasi antara keimanan dan kemajuan peradaban. Oleh karena itu, kaderisasi IMM diarahkan untuk menghasilkan kader yang tidak hanya religius, tetapi juga progresif, inovatif, dan mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

c. Nilai Dasar Ikatan (NDI)

Nilai Dasar Ikatan (NDI) merupakan sistem nilai yang menjadi identitas ideologis kader IMM. NDI berfungsi sebagai kerangka berpikir dan pedoman bertindak yang membentuk karakter kader dalam menjalankan peran intelektual, sosial, dan keagamaan.

Secara substantif, NDI menekankan integrasi antara akidah, ilmu pengetahuan, dan amal sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai tersebut mengarahkan kader untuk mengembangkan kapasitas intelektual yang dilandasi keimanan serta diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat.

Dalam SPI 2025, NDI menjadi instrumen penting dalam membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia, kritis terhadap realitas sosial, serta memiliki komitmen terhadap transformasi masyarakat. Melalui internalisasi NDI, kader IMM diharapkan mampu mengembangkan kesadaran profetik yang berorientasi pada humanisasi, liberasi, dan transendensi.

4. Tujuan Sistem Perkaderan Ikatan (SPI)

Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) diselenggarakan untuk membentuk kader yang memiliki kapasitas keislaman, keilmuan, kepemimpinan, dan kemanusiaan yang memadai guna menjalankan peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan perkaderan tidak hanya berorientasi pada pembentukan loyalitas organisasi, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan zaman.

SPI 2025 menegaskan bahwa perkaderan bertujuan membentuk kader yang memiliki kesiapan untuk berkembang sesuai dengan bidang profesinya, berpikir kritis, logis, dinamis, kreatif, terampil, serta memiliki integritas moral yang kuat.[104] Kader juga diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya dalam empat medan perjuangan IMM, yaitu:

a. Persyarikatan, yaitu pengabdian dan kontribusi terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.
b. Keumatan, yaitu keterlibatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat Islam.

[104] Korps Instruktur Nasional.

c. Kebangsaan, yaitu partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.
d. Kemanusiaan, yaitu kontribusi terhadap penyelesaian persoalan kemanusiaan secara universal.

Selain itu, SPI bertujuan menghasilkan kader yang memiliki kapasitas akademik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlakul karimah, mandiri, bertanggung jawab, serta berkomitmen terhadap perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, perkaderan IMM diarahkan untuk melahirkan kader yang mampu mengintegrasikan religiusitas, intelektualitas, dan aksi sosial dalam kehidupan nyata.

5. Trilogi IMM sebagai Basis Perkaderan

Trilogi IMM merupakan identitas dan paradigma utama yang menjadi orientasi seluruh proses kaderisasi IMM. Trilogi tersebut terdiri atas religiusitas, intelektualitas, dan humanitas yang saling melengkapi dalam membentuk karakter kader.[105]

a. Religiusitas

Religiusitas merupakan dimensi spiritual yang menjadi fondasi utama kader IMM. Religiusitas berakar pada akidah Islam yang kokoh, ketaatan dalam menjalankan ibadah, serta kesadaran akan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

[105] Fatah and Rasai, "Model Pendidikan Kader Berbasis Wawasan Kebangsaan Di Era-Post-Trust: Studi Kasus Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara."

Dalam perspektif IMM, religiusitas tidak dimaknai secara sempit sebagai aktivitas ritual semata, tetapi juga mencakup pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kader yang religius adalah kader yang mampu menghadirkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam setiap aktivitasnya.

b. Intelektualitas

Intelektualitas merupakan kemampuan kader dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, berpikir kritis, serta menghasilkan gagasan yang mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat. Sebagai gerakan mahasiswa, IMM menempatkan tradisi intelektual sebagai salah satu pilar utama gerakan.

SPI menegaskan bahwa IMM adalah gerakan ilmu yang berlandaskan prinsip ilmu amaliah dan amal ilmiah. Artinya, ilmu pengetahuan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, sementara setiap tindakan harus didasarkan pada landasan keilmuan yang kuat.

Melalui dimensi intelektualitas, kader didorong untuk memiliki budaya membaca, meneliti, menulis, berdiskusi, dan melakukan analisis kritis terhadap berbagai persoalan sosial sehingga mampu menjadi agen perubahan yang berbasis pengetahuan.

c. Humanitas